

**PERAN LEMBAGA ZAKAT DIMPET DHUAFI DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KAUM DUAFI
DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Program Pertanian Kecamatan
Pekalongan Desa Siraman Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi S1 (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

Dian Lativa Hanim

NPM: 1651010458



Program Studi Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2021

**PERAN LEMBAGA ZAKAT DOMPET DHUAFA DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KAUM DUAFA
DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Program Pertanian Kecamatan
Pekalongan Desa Siraman Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh
Dian Lativa Hanim
NPM: 1651010458



Jurusan: Ekonomi Syariah

Pembimbing I : A. Zuliansyah, S.Si., M.M
Pembimbing II : Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021**

ABSTRAK

Dana Zakat produktif yaitu pada bidang program kerja pendayagunaan ekonomi dimana mereka mengeluarkan dana tersebut untuk mendayagunakan masyarakat yang memiliki potensi namun memiliki kekurangan dalam hal modal. Salah satu bentuk dari zakat produktif yang disalurkan oleh dompet dhuafa adalah program mitra tani yang di bentuk oleh lembaga zakat dompet dhuafa. Berada pada daerah pekalongan, desa siraman. dengan memiliki 2 dusun binaan, dimana dusun tersebut memiliki potensi namun kurang nya fasilitas untuk dapat berkembang. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran lembaga zakat dompet dhuafa dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa dalam prespektif ekonomi islam (studi kasus program pertanian di kecamatan pekalongan lampung), dan juga untuk mengetahui adanya faktor pendukung dan penghambat lembaga zakat dompet dhuafa dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa dalam prespektif ekonomi islam (studi kasus program pertanian di kecamatan pekalongan lampung). Dengan metode penelitian berjenis penelitian kualitatif, metode pengambilan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan di analisis dengan pendekatan induktif. Hasil Penelitian dalam pengembangan program pertanian dalam rangka meningkatkan ekonomi Mustahiknya adalah : Pertama. Penguatan karakter bertani, aspek peningkatan hasil bertani, dan pemasaran hasil tanam melalui pelatihan serta motivasi untuk dapat meningkatkan hasil panen agar bernilai jual tinggi. Kedua. Pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan program pertanian. Ketiga, Pendistribusian modal kepada mitra tani desa siraman didasarkan pada akad pinjaman tanpa bunga. Untuk faktor pendukung pelaksanaan program pertanian desa siraman, pekalongan, lampung yaitu sudah ada konsep panduan yang jelas mengenai pelaksanaan program pertanian desa siraman, pekalongan, lampung, loyalitas para mitra tani yang sangat baik. Sedangkan faktor penghambat program pertanian desa siraman, pekalongan, lampung yaitu, tingkat pendidikan, keterbatasan lahan serta sumber daya manusia yang kurang baik dan program mitra tani sudah sesuai dengan kaidah islam dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.

Kata Kunci : Dompet Dhuafa, Peningkatan Ekonomi, dan Prespektif Ekonomi Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Telkol. H. Endro Suratmin, Sukarami, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**PERAN LEMBAGA ZAKAT DIMPET DHUAF
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
KAUM DUAFADALAM PRESPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi Kasus Program Pertanian Kecamatan
Pekalongan Desa Siraman Lampung)**

Nama
NPM
Jurusan
Fakultas

Dian Latifa Hanim
1651010458
Ekonomi Syariah
Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

A. Zulhasyah, S.Si., M.M
NIP. 198302222009121003

Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak
NIP. 199307302018012001

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.Si

NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

ol. H. Endro Suramin, Sukrame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN LEMBAGA ZAKAT DIMPET DHUFA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KAUM DUAFADALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Program Pertanian Kecamatan Pekalongan Desa Siraman Lampung)” disusun oleh, **Dian Lativa Hanim NPM: 1651010458** Jurusan Ekonomi Syaria'ah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari Senin /Tanggal: **05 Juli 2021**.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang : Madnasir, S.E., M.S.I

Sekretaris : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.EK

Penguji I : Dr.H.Nasruddin, M.Ag

Penguji II : A.Zuliyansyah, S.si., M.M

Penguji III : Dinda Fali Rivian, S.E., M.Ak

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 498008012003121001

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan..”

(Q.S. Al-Baqarah :110)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda terima kasih, cinta, kasih, hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua-ku, Tri Budi Cahyono dan Ibu Siti Yualaikah, terkhusus untuk orang tua saya yang masih ada dan selalu memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, finansial dan nasihat yang tulus, serta selalu memberikan doa setiap waktu. Atas doa, dukungan, dan pengorbanannya yang selalu diberikan tiada henti hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala atas bertambahnya ilmu seorang anak untuk kedua orang tua saya, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan rezeki, sisa umur yang bermanfaat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk suami-ku M. Arief Algahafiqi, anak Farzana Zafira Hasan, serta kakak-ku (Almh.) Widya Eka Prahastiwi.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP



Dian Lativa Hanim dilahirkan di Terusan Nyunyai, 28 Agustus 1997. Penulis merupakan anak ketiga yang menjadi anak terakhir dari pasangan Bapak Tri Budi Cahyono dan Ibu Siti Yualaikah. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak di TK Darma Wanita selesai pada tahun 2004, melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Terusan Nyunyai selesai tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Terusan Nyunyai selesai tahun 2013, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terusan Nyunyai selesai tahun 2016. Pada tahun yang sama, mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah dimulai dari semester 1.

Bandar Lampung, Juni 2021

Dian Lativa Hanim
1651010458.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Duafa dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Program Pertanian Kecamatan Pekalongan Desa Siraman Lampung)”.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi di jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi, tak lupa dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penyusunan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.
3. Bapak A. Zuliansyah, S.Si., M.M. selaku Pembimbing Akademik I yang telah mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan mendapatkan barakah dari Allah SWT.
4. Ibu Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak, selaku Pembimbing Akademik II yang telah membimbing penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan mendapatkan barakah dari Allah SWT.
5. Segenap Dosen jurusan ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak/Ibu civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

7. Seluruh staf pegawai perpustakaan yang telah memberikan pinjaman buku kepada penulis.
8. Pimpinan Dompot Dhuafa Kecamatan Pekalongan Desa Siraman Kota Metro, dan para pegawai yang telah meluangkan waktunya dan kesediaannya dalam penelitian skripsi ini.
9. Untuk kawan kawan kelas F di kampus, baik yang sudah menjadi sarjana maupun yang sedang berjuang demi gelar sarjana yang telah memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah islamiyah. Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi diharapkan dapat membberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang Ekonomi Islam.



Bandar Lampung
Penulis,

Dian Lativa Hanim
1651010458.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Metode Penelitian	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	17
1. Zakat	17
2. Pengertian Peranan	45
3. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Ekonomi	47
4. Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Dalam Islam Kesejahteraan	50
5. Maqashid Syari'ah	51

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dompot Dhuafa	55
B. Deskripsi Data	64

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Lampung Dalam Pengembangan Program Pertanian Desa Siraman	77
B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Pertanian Desa Siraman, Pekalongan, Lampung	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108
-------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penghasilan Warga Perdusun 3 Dan 4 Sebelum Mendapatkan Bantuan Dari Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Lampung Peduli Desa Siraman, Pekalongan Lampung	6
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 SOP Penerimaan ZIS	65
Tabel 3.2 Bidang Ekonomi, Program Mitra Tani	71
Tabel 3.3 Daftar nama anggota program pertanian Desa Siraman, Pekalongan, Lampung	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktural Pengurus Dompot Dhuafa Lampung ...	61
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman/Hasil Wawancara	108
2. Dokumentasi	116
3. SK Pembimbing	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna judul dari skripsi ini, yaitu : Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa dalam Perspektif Ekonomi Islam, serta untuk memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat istilah yang terdapat pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran¹

2. Lembaga zakat

Lembaga yaitu merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan serta nilai-nilai yang nyata yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang sedangkan zakat adalah salah satu kewajiban yang disyariatkan allah kepada umat islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah serta dengan shalat, puasa, dan ibadah haji.²

3. Dompot Dhuafa

adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan upaya dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf, dan dana lainnya yang halal serta legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau kelompok).³

¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 267

²Wahbbah Al-Zuhaly, *Zakat Berbagai Mazhab* (Bandung : PT Rosdakarya 2005),h.83

³Dompot Dhuafa, (*Membentang Kebaikan*, Jakarta 2016),h.6

4. Kaum Dhuafa

Dhuafa menurut istilah yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Quran, yang mengandung makna lemah fisik, baik karena belum cukup umur, lanjut usia ataupun karena faktor kualitas kesehatan.⁴

5. Ekonomi Islam

yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah - masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai – nilai islam. Ekonomi Islam menurut Umar Chapra yaitu sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang berpedoman pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu yang berkesinambungan lingkungan.⁵

Berdasarkan penjelasan dari istilah- istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana peran lembaga zakat dompet dhuafa dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa.

B. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan problematika yang sulit untuk diatasi bangsa Indonesia bahkan sejak saat menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945. Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2017 sebesar 5,33 persen. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan serta pengangguran merupakan permasalahan yang sangat penting dan perlu perhatian yang

⁴Asep Usman Ismail, Dkk, (*Pengamalan Al-Quran tantang Pemberdayaan Dhuafa*, Jakarta : Dakwah Press, 2008),cet ke-1,h.18-19

⁵Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Kencana : 2007) h.15

lebih.⁶Yusuf Qardhawi Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang membahayakan aqidah, akhlak, moral, keluarga, masyarakat dan mengancam kestabilan pemikiran. Oleh Sebab, seseorang yang terjatir kesulitan ekonomi, pada umumnya menyimpan kedengkian terhadap orang yang kaya.

Bahkan, menurut Imam al-Nawawi sebagaimana dikutip dari Yusuf Qardhawi mampu melenyapkan kebaikan, menimbulkan kehinaan, dan mendorong seseorang harus dianggap sebagai bencana serta segera ditanggulangi, salah satunya melalui pemberdayaan potensi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).⁷ Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid serta shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam serta diakui keislamannya.⁸ Di dalam zakat memiliki dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi vertikal yang berhubungan antara kaum muslim dengan Allah SWT, dan dimensi horizontal dimana seorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain. Tujuan zakat agar dapat dikatakan berhasil itu sangat bergantung pada pengelolaan serta pemanfaatannya.

Lembaga zakat di indonesia di atur secara khusus pengelolaannya pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat⁹. Menurut undang- undang tersebut bahwa terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 lembaga pengelolaaan zakat sangatlah berperan penting karena akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi

⁶<https://www.bps.go.id> di akses pada tanggal 21 september 2020. Jam 08.30

⁷Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press 1995, h. 3

⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, cet. Ke-12*, Jakarta: Lintera Antarnusa, 2011, h. 3

⁹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

masyarakat indonesia dan berperan mewujudkan keadilan bagi agama islam. sehingga 2 lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama dari zakat dapat tercapai dengan baik. Sejak di tetapkannya undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 23 september 1999¹⁰

Hal tersebut telah diatur dan dibentuk, bahwa dibentuk 2 badan pengelolaan zakat yang resmi untuk mengelola zakat masyarakat, namun masih ada sebagian warga masyarakat yang mengelurkan zakat nya kepada selain kedua lembaga resmi tersebut. Biasanya muzakki memberikan langsung zakatnya secara langsung kepada *mustahiq* ataupun lewat masjid, tentunya proses pemberian zakat secara langsung kepada *mustahiq* sangatlah beresiko karena selain pemberiannya masih bersifat konsumtif, dan *saaat ini* banyak terjadi pemberian dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh orang pengusaha banyak terjadi masalah karena kurangnya terorganisir cara pembagiannya. Hal ini akan berbeda ketika seharusnya muzakki membayarkan kepada badan pengelolaan zakat yang resmi, selain pengelolaan dan pendistribusian dana zakat jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, dana zakat yang disalurkan oleh badan pengelolaan zakat seperti Lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat yaitu lembaga zakat Dompot Dhuafa.

Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pembentukan yayasan Dompot Dhuafa dilakukan dihadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika disahkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh

¹⁰ Zainudin, "hukum zakat"(makasar : alaudin univesity press),.h.67

Kementrian Agama RI.

Hal ini tentu membuat Dompot Dhuafa Republika mempunyai Legalitas supaya dapat melakukan pelaksanaan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang sebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaga zakat Dompot Dhuafa menyalurkan dan mendistribusikan dana bantuan zakat, infak dan sedekah melalui bidang program kerja yang mereka bentuk yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Dana zakat yang disalurkan untuk zakat konsumtif yang mereka keluarkan pada program pendidikan, relief, sosial dan kesehatan. Dana Zakat produktif yaitu pada bidang program kerja pendayagunaan ekonomi dimana mereka mengeluarkan dana tersebut untuk mendayagunakan masyarakat yang memiliki potensi namun memiliki kekurangan dalam hal modal.

Salah satu bentuk dari zakat produktif yang disalurkan oleh dompet dhuafa adalah program mitra tani yang di bentuk oleh lembaga zakat dompet dhuafa. Berada pada daerah Pekalongan, Desa Siraman. Dengan memiliki 2 dusun binaan, dimana dusun tersebut memiliki potensi namun kurang nya fasilitas untuk dapat berkembang.

Pada kenyataannya berdasarkan survei diawal dusun 3 dan 4 adalah mayoritas pekerjaan warganya adalah sebagai penggrap atau buruh tani padi yang tidak memiliki modal lahan garapan tanah dan modal bibit tanam

Tabel. 1.1
Data Penghasilan Warga Perdusun 3 Dan 4 Sebelum
Mendapatkan Bantuan Dari Lembaga Zakat Dompot Dhuafa
Lampung Peduli Desa Siraman, Pekalongan Lampung

No	Dusun	Tahun	Pekerjaan	Jumlah waraga	pendapatan Warga perbulan
1	Dusun 3	2016	Buruh tani	24	Rp.490.600
2	Dusun 4	2016	Buruh tani	25	Rp.485.833

Sumber : wawancara narasumber warga dusun 3 dan 4 desa siraman.

Data penghasilan warga setelah menerima bantuan dari Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Lampung.

No	Dusun	Tahun	Pekerjaan	Jumlah waraga	pendapatan Warga perbulan
1	Dusun 3	2017	Buruh tani	24	Rp.480.417
2	Dusun 4	2017	Buruh tani	25	Rp.480.417

Sumber : wawancara narasumber warga dusun 3 dan 4 Desa siraman

Dari data diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa adanya masalah pada pendapatan yang didapat oleh warga dusun 3 dan 4 sesudah mendapatkan dana bantuan yang mengalami penurunan pendapatan perharinya.

Atas pemikiran tersebutlah penulis tertarik untuk membahas masalah Lembaga Amil Zakat dengan Judul “Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa dalam Perspektif ekonomi islam (studi kasus program pertanian kecamatan pekalongan desa

siraman Lampung)''

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus masalah penelitian adalah peran Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi kaum dhuafa dalam bidang ekonomi khususnya program pertanian yang di berikan bantuan oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa di Kecamatan Pekalongan, desa Siraman Dusun 3 dan 4.

D. Rumusan Masalah

Sebelum menentukan pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya, maka perlu dijelaskan batas permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan supaya, dalam penulisan ini dapat mempermudah untuk merumuskan suatu rumusan masalah yang akan diuraikan dalam pembahasan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dalam Peningkatan Perekonomian Kaum Dhuafa dalam prespektif ekonomi islam (studi kasus program pertanian di kecamatan pekalongan desa siraman lampung)?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat lembaga Zakat Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus program pertanian di kecamatan pekalongan desa siraman lampung)?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa dalam Perspektif ekonomi Islam (studi kasus program pertanian di kecamatan pekalongan lampung).
2. Untuk mengetahui adanya faktor pendukung dan

penghambat Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa dalam Perspektif ekonomi Islam (studi kasus program pertanian di kecamatan pekalongan lampung).

F. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan, dan untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.¹¹

Kegunaan yang di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya program studi ekonomi islam mengenai solusi masalah peningkatan perekonomian pada masyarakat khususnya kaum dhuafa melalui peran zakat supaya menciptakan masyarakat beragama yang sejahtera
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada lembaga zakat Dompot Dhuafa dalam menjalankan dan mengembangkan program kesejahteraan masyarakat khusus nya kaum dhuafa

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Nama : Dameria Karmelita & Nursanita Nasution Tahun : 2020 Jurnal/Skripsi : Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Judul : Studi Fenomenologi Pengelolaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah ialah dengan pertama muzaki mentransfer ke rekening Dompot Dhuafa, dan yang kedua Dompot Dhuafa mengangkat isu-isu kemanusiaan dan kemiskinan untuk mengajak partisipasi

¹¹Ridwan. Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009),h.11

	<p>Zakat, Infak, Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)</p>	<p>masyarakat berdonasi. Upaya dalam pendistribusian ZIS di Dompot Dhuafa dengan cara tiga tahap yaitu, pertama konsep program yang jelas, kedua program bantuan berkelanjutan, ketiga dapat melibatkan partisipasi banyak orang. Strategi pengelolaan yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa yang pertama dengan cara melihat potensi pasar yang ada yaitu melalui sebuah program pemberdayaan dengan memberikan pelatihan kepada para mustahik agar para mustahik memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Strategi yang terakhir mrngaktifasi masyarakat yaitu memberikan bantuan kepada para mustahik yang mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Program Dompot Dhuafa dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga Dhuafa pada tahun 2019 terdiri 6 kegiatan program.¹²</p>
2.	<p>Nama : Hotlina Tahun : 2020 Jurnal/Skripsi : Diambil</p>	<p>Hasil penelitian ini Peranan Program Kampung Ternak Lembaga Amil Zakat Dompot</p>

¹² Dameria Karmelita & Nursanita Nasution, Studi Fenomenologi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa), Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 2020, h.2.

	<p>Dari Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Judul : Peranan Program Kampung Ternak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah</p>	<p>Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik dapat dikatakan baik karena dapat meningkatkan pendapatan para mustahik, Faktor Pendukung di dalam program kampung ternak ini adalah semangat para mustahik, adanya pelatihan dan pengawasan yang dilakukan Dompot Dhuafa dan minat masyarakat terhadap hewan ternak masih tinggi. Faktor penghambat, kurangnya kesabaran para mustahik dalam menjalankan program.¹³</p>
3.	<p>Nama : Suci Nur Fauyiah</p> <p>Tahun : 2018</p> <p>Jurnal/Skripsi : Diambil Dari Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018</p> <p>Judul : Dampak Pelaksanaan Program Community Development Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Karang Kulon Dalam Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program Community Development yang dilakukan oleh DD mampu mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual. Program yang dilakukan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat pedukuhan Karang Kulon anggota kelompok Berkah Lestari dengan mengembangkan usaha batik warga. Ditandai dengan meningkatnya pengetahuan agama, terpenuhi kebutuhan papan, sandang dan pangan, meningkatnya pendidikan anak dan generasi</p>

¹³ Hotlina, Peranan Program Kampung Ternak Lembaga Amil, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020, h. 100.

		mendatang, berkurangnya intensitas berhutang serta meningkatnya pendapatan warga. ¹⁴
4.	<p>Nama : Irfan Syauqi Beik</p> <p>Tahun : 2009</p> <p>Jurnal /Skripsi : Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009</p> <p>Judul : Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika</p>	<p>Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kajian ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan. Mudah-mudahan kajian di tingkat mikro ini dapat menjadi stimulus bagi kajiankajian serupa di tingkat yang lebih luas lagi¹⁵</p>
5.	<p>Nama : Shafwan Ismail, Sri Sudiarti & M. Ridwan</p> <p>Tahun : 2018</p> <p>Jurnal/Skripsi :</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan dampak pemberdayaan dana ZIS yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan yaitu:</p>

¹⁴ Suci Nur Fauyiah, Dampak Pelaksanaan Program Community Development

Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Karang Kulon Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, h. 84.

¹⁵ Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009, h. 10.

	<p>KITABAH: Volume 2. No. 2 Juli – Desember 2018</p> <p>Judul : Peranan Dompot Dhuafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan</p>	<p>a. Memberikan hasil bahwa pemberdayaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh para mustahik.</p> <p>b. Dompot Dhuafa ini telah menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan.</p> <p>c. Mendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif dengan pengembangan zakat produktif yaitu dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain, padahal usaha mikro mustahik memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan</p> <p>¹⁶</p>
--	---	---

H. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian yaitu sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin.

¹⁶ Shafwan Ismail, Sri Sudiarti & M. Ridwan, Peranan Dompot Dhuafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kota Medan, KITABAH: Volume 2. No. 2 Juli – Desember 2018, h. 272.

Metodelogi juga merupakan analisis teori mengenai sesuatu cara ataupun metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk dapat meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis serta terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.¹⁷

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan yang memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan yang sedang terjadi. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah supaya mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸

a. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang pada pokoknya memiliki filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian bersifat kualitatif ini memiliki hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah penelitian yang berusaha untuk dapat menentukan pemecahan masalah yang ada saat ini berdasarkan dengan data-data. Dan juga meyakinkan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dengan mengumpulkan hasil data- data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian lapangan.²⁰

¹⁷Suharismi Arikunto, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Bina Aksara, 2006), h.112

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : CV,Alfabeta, 2012), h.2

¹⁹Kartini, *Pengantar Metedologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), h.57

²⁰Rony Kountur, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h.4

b. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang didapat atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis. pada hal ini, data primer yang didapatkan melalui wawancara kepada responden.
- b. Data Sekunder, adalah sumber data tambahan untuk penunjang, berbagai bahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek dan tujuan dari penelitian ini. Bahan tersebut diharapkan supaya dapat melengkapi dan memperjelas data-data primer seperti buku, artikel dan lain-lain serta tujuan dari adanya penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi penelitian dan buku dari perpustakaan sehingga penulis dapat menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan sesuatu yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting yaitu proses-proses dari pengamatan dan ingatan, dalam penelitian ini penulis mengamati langsung terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa (studi kasus program pertanian di kecamatan pekalongan lampung)

b. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin adalah proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas.

Tujuannya adalah agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan diwawancara adalah orang yang bekerja di lembaga

perusahaan dompet dhuafa yang berperan pada bidang ekonomi khususnya program pertanian penyaluran dan penghimpunan dana pada bantuan lembaga zakat dompet dhuafa, serta kaum dhufa yang mendapatkan bantuan.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah “mencari” dan mengenal hal – hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan notulen rapat.²¹ seiring dengan pendapat diatas bahwa penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai analisis pemberdayaan kaum dhuafa dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa itu sendiri di kecamatan pekalongan desa siraman lampung.

c. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat deskripsi tentang keadaan-keadaan ataupun kejadian-kejadian²² penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.²³

a. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi, yaitu suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun objek dengan kualitas dan karakteristik- karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Populasi bisa berupa subjek maupun objek yang diteliti. Populasi bisa berbentuk manusia, tumbuhan, hewan, produk, ataupun

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka cipta, 2010), h. 78

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : teori & praktek*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, h.160

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1983, h.18

dokumen. sehingga, populasi bukan hanya orang, juga objek benda-benda alam lain. Populasi pun bukan sekedar jumlah pada subjek maupun objek yang dipelajari, melainkan meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kaum dhuafa khususnya program pertanian di kecamatan pekalongan desa siraman lampung.

- 2) Sampel, adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus benar-benar dapat mewakili. Ukuran dari sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Jika jumlah dari suatu populasi kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka dapat diperoleh 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.²⁵ Dalam penelitian yang dibawa penulis, maka penelitian ini menggunakan rumus penelitian menurut arikunto, dikarenakan populasi yang mengikuti program mitra tani tersebut sebanyak 25 orang, maka peneliti mengambil seluruh responden tersebut.

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kkualitatif Dan R & D*, (Bandung Alfabeta, 2016),h.80

²⁵Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).h78

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Teori Zakat

Zakat merupakan pilar dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan serta pengangguran kemiskinan. Demikian pula pada zakat tidak menghalangi negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiskal dan skema-skema redistribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan serta peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri.²⁶

Zakat disalurkan agar memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis di pakai dari hari kehari. Meskipun dapat mampu membantu fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabaikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Pemberian “ikan” yang terus menerus tidak akan mendorong orang menjadi “tukang pancing” terutama zakat dibagikan berdasarkan *flat rate*. Karena itu “reorientasi” prioritas pemanfaatan zakat itu sendiri perlu dilakukan ke arah manfaat dalam jangka panjangnya. Pertama zakat harus dapat dibagikan sebagai “pajak pendapatan negatif” agar mempertahankan insentif kerja atau mencari penghasilan sendiri dilingkungan fakir miskin.

Kedua yaitu sebagian dari zakat yang terkumpul (setidaknya 50%) harus dapat di gunakan untuk membiayai kegiatan memberikan “pancing”(kegiatan produktif) pada kelompok masyarakat fakir- miskin.²⁷ Zakat dapat meningkatkan pendapatan orang-orang

²⁶Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2005), Hal.34

²⁷*Ibid.*35

miskin. sebab rendahnya pendapatan mereka, tambahan pendapatan tersebut akan dipergunakan keseluruhannya untuk membeli barang-barang.

Zakat memperbaiki cara konsumsi, produksi serta distribusi dalam masyarakat Islam. salah satunya kejahatan terbesar dalam sistem kapitalisme yaitu penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi yang dikuasai segelintir manusia yang beruntung, sehingga dapat mengabaikan orang-orang yang kurang mampu yang jumlahnya sangatlah banyak.

Hal ini berdampak pada perbedaan dalam hal pendapatan yang ada dan akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan industri serta perdagangan dalam negeri. sebab suatu tatanan ekonomi dan dimonopoli, selalu menghalangi pemanfaatan sumber daya ekonomi suatu negara dengan sepenuhnya²⁸. Zakat merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan seharusnya dapat kembali lebih di perhatikan. Sebab zakat merupakan sebuah potensi besar yang menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Seandainya konsep zakat diterapkan, secara nasional ataupun multinasional. Maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan teratasi dengan segera.

Unsur dalam sebuah zakat adalah pemberian harta tanpa mengharap imbalan dan balasan.²⁹ Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan ataupun manajemennya harus berjalan dengan

²⁸ *Ibid*, Hal. 37.

²⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir FI Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal .285

baik.³⁰ Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus bisa diukur (Widodo, 2003).³¹

Untuk itu, terdapat tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belum cukup. Harus dapat diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan adanya transparan pengelolaan zakat, maka kita dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. Pertama, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga untuk pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan berhati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ harus memiliki sistem,

³⁰ Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

³¹ Hartanto widodo dan teten rustiawan “kuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat” (asy syanilpress : bandung) tahun 2003

prosedur dan aturan yang jelas manajemen terbuka mempunyai *activity plan* mempunyai *lending commite* memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan diaudit publikasi, perbaikan terus menerus. Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal.

Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder. Pertama, para pembayar zakat (muzaki). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para muzaki. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan progress report berkala, mengundang muzaki ke tempat mustahik, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi dan lain-lain. Kedua, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para amil yang amanah dan profesional. Setelah itu, LPZ juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para amil untuk berkembang dan berkarya. Sehingga menjadi amil betul-betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah SWT. Para amil dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip seperti: ikhlas, sabah, amanah, jujur dan inovatif.

Disamping itu, sistem operasional LPZ juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para amil. Sehingga para amil dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun LPZ. Ketiga, pengambil kebijakan. Kebijakan dalam konteks kenegaraan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan LPZ. Dengan adanya peraturan seperti UU, maka LPZ akan dapat bergerak secara legal. Sehingga LPZ mempunyai landasan yang cukup kuat dalam mengelola zakat. Lain halnya ketiga belum ada konstitusi yang mengatur, sehingga gerak dan langkah LPZ menjadi begitu terbatas.

Keempat, media massa. Media merupakan penyambung lidah. Dengan begitu banyaknya oplah media diharapkan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat akan semakin luas. Oleh karenanya LPZ mesti mampu menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan media massa. Sehingga tidak adalagi jarak antara LPZ dengan masyarakat

b. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada penciptanya daripada dengan hartanya. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Adapun zakat menurut *syara* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut terminologi para *fugaha*, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.³² Zakat ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan- ketentuan dalam agama Islam.³³ Berdasarkan uraian di atas bahwa zakat berarti sebagian harta kekayaan yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dan telah memenuhi syarat- syarat tertentu pula yang berguna untuk mensucikan diri dan hartanya, serta menumbuhkembangkan dan menjadikan hartanya berkah.

³²Wabbah Al-Zuhayly, Zakat : kajian berbagai mazhab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 83

³³Syukri Ghazali, dkk. Pedoman Zakat 9 Seri, (Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 2000) hal. 171

c. Dasar hukum zakat

Hukum zakat adalah wajib, sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur“an diantaranya yaitu :
Surah Al- Bayyinah (98) ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

“Wa ma umiru illa liya budullaha mukhlisina lahuddina hunafa a wa yuqimus salata wa yu tuz zakata wa zalika dinulqayyimah”

Artinya: ”padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam(menjalankan)agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.(Q.S Al-Bayyinah:5)³⁴

Dalam firman Allah diatas, Allah mengkhususkan ibadah shalat dan zakat karena pentingnya kedua ibadah tersebut. Shalat suatu ibadah yang berhubungan dengan jasmani, sedangkan zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta yang kedua- duanya disebutkan beriringan di dalam Al-Qur“an.

d. Tujuan Zakat

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dan kesulitan hidup dan penderitaan.

³⁴Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemahan ,(Jakarta Pusat :Pena Pundi Aksara,2002),hal.598

- 2) Membantu pemecahan sebuah masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan para *mustahik* lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki serta iri hati dari orang-orang miskin.³⁵

e. Manfaat dari zakat:

- 1) Sebagai wadah menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum *aghniya* dan *dhuafa*.
- 2) Sebagai wadah pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh seseorang yang jahat.
- 3) Sebagai pengembalian potensi umat serta menunjukkan bahwa umat Islam merupakan *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *tafakul ijtima'* (tanggung jawab bersama).
- 4) Dukungan moral bagi muallaf.
- 5) Sebagai wadah mengatasi penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
- 6) Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam "*social distribution*" yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya.
- 7) Sebagai wadah menyucikan diri dari perbuatan dosa.
- 8) Sebagai wadah dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam.

³⁵Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina, 2011, h.32

9) sebagai ibadah “*maaliyah*”.³⁶

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi memiliki tujuan agar dapat memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh sebab itu prinsip zakat dapat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan serta kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.³⁷

f. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, serta menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut dapat diserahkan kepada wakilnya yaitu imam ataupun orang yang bertugas untuk memungut zakat. Zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Beberapa syarat wajib zakat yang harus dapat dipenuhi bagi orang yang akan mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang

³⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 297.

³⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet. 5 2011, h. 171

wajib dizakati

- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun
- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
- 9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.³⁸

Syarat merupakan ketentuan ataupun perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu hal, ketika salah satu syarat tidak dapat terpenuhi maka dianggap tidak sah. Maka dari itu, harus terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.

g. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah disebutkan dalam surat At- Taubah ayat 60, seperti berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“innamaa alshshadaqaatu lilfuqaraa-i waalmasaakiini waal’aamiliinai ‘alayhaa waalmu-
allafati quluubuhum wafii alrriqaabi waalgharimina
wafii sabiili allaahi waibni alsabiili fariidhatan
mina allaahi waallaahu ‘allimun hakiimun”

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada

³⁸Wabah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Hal.97-114

dalam perjalanan”.(Q.S At- Taubah: 6)

Ayat ini menjelaskan ada delapan *ashnaf* (bagian) orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim (orang yang berhutang), sabilillah, dan ibnu sabil. Setiap *ashnaf* yang di uraikan di atas harus mendapatkan bagian jika ada semuanya. Akan tetapi, apabila mereka tidak lengkap, maka semua harta zakat dibagikan kepada *ashnaf* yang ada.

Kelompok penerima zakat yang dimaksud dalam ayat diatas yaitu:

1) Fakir

Faqir yaitu mereka yang tidak berharta dan tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Miskin

Miskin merupakan kondisi seseorang yang memiliki sumber penghasilan, namun penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.

3) Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Amil adalah orang yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat.

4) Mu'allaf

Orang-orang *muallaf* yang dibujuk hatinya yaitu orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu adalah untuk kemaslahatan Islam.

5) Riqab (orang-orang yang memerdekakan budak)

Orang yang membelibudak dari harta zakatnya untuk dapat memerdekakannya. Namun, untuk sekarang ini sudah tidak terdapat lagi perbudakan.

6) Orang Yang Memiliki Hutang

Al-gharimun ialah orang-orang yang memiliki hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat serta zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka.

7) Orang Yang Berada Dijalan Allah

Orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela Islam. Maka Mereka yang berjuang terhadap umat supaya mereka semua mendapat ridha Allah SWT. Termasuk didalamnya untuk pengembangan agama dan negara.

8) Ibnu Sabil

Orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain serta sudah tidak punya harta lagi.³⁹ Segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapatmendatangkan belanjanya dari kampungnya, meski ia orang yang berharta di kampungnya Zakat untuk ibnu sabil adalah upaya sosial untuk jaminan rasa nyaman dan tidak terlantar di wilayah kaum muslimin.

h. Jenis-Jenis Zakat

Zakat menurut jenisnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) Zakat Fithrah

Zakat fithrah yaitu satu *sha'* (2,5 kilogram) dari makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang hamba ketika selesai bulan Ramadhan. Zakat fithrah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Mulai diwajibkannya zakat fithrah adalah apabila matahari telah tenggelam pada malam '*Ied*'.⁴⁰ Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan

³⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011),hal.189-193

⁴⁰Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*,Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 1. 2008, h. 149

dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya yang dikeluarkan merupakan bagian dari barang. Lalu dapat dikeluarkan baik berupa barang atau uang dengan nilai yang sama.⁴¹

2) Zakat Mal

Zakat harta (*Zakat Mal*) yaitu zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syaratsyaratnya seperti nishab dan haul, walaupun tidak semua zakat mal ada nishab dan haul. Diantara jenis zakat mal:⁴²

- a) Pertanian dan buah-buahan
- b) Emas dan perak
- c) Mata uang
- d) Hewan ternak
- e) Perdagangan
- f) Harta terpendam dan Barang Tambang

i. Syarat-Syarat Harta yang Wajib Dizakati

- 1) Islam Tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk islam).
- 2) Aqil, Baligh dan Mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk) zakat itu tidak diwajibkan kepada (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati.
- 3) Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat).
- 4) Untuk wajibnya zakat disyariatkan milik penuh. Milik penuh (*tamlik*) yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok.
- 5) Mencapai nishab, yaitu kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat.

⁴¹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat*, Bandung: tafakur (kelompok Humaniora)-Anggota IKAPI Berkhidmat untuk Umat, 2011, h. 167

⁴² Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Elek MediaKomputindo 2011, h. 59

- 6) Waktunya sampai setahun atau haul, menurut ijma', setahun merupakan syarat wajibnya zakat. Zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia memiliki nishab dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya.⁴³ Syarat satu tahun itu tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian), buah-buahan, harta karun/ temuan (*rikaz*) dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu haul/setahun.
- 7) Lebih dari kebutuhan pokok, melebihi dari kebutuhan rutin/primer.
- 8) Diambil dari objek zakat
- 9) Tidak diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, mencuri dan lain-lain. Juga tidak ada zakat untuk harta yang memang haram seperti Babi, Anjing, Khamr, Narkoba.⁴⁴

Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu:

- 1) Kepemilikan yang bersifat penuh, bahwa harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut, dalam memanfaatkan harta maupun menikmati hasil dari harta tersebut.
- 2) Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang Harta harus mencapai nishab
- 3) Harta harus lebih dari kebutuhan pokok, harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia.
- 4) Harta zakat harus bebas dari sisa utang, harta yang akan dizakatkan harus bebas dari sisa utang.

⁴³Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Elek MediaKomputindo 2011, h. 31

⁴⁴Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, cet. I, h. 76

Harta aset yang harus berada dalam kepemilikan selama setahun penuh (haul).

j. Pengertian Amil, Lembaga Pengelola Zakat dan Tugasnya

1) Amil Zakat

Amil adalah para pekerja yang telah disertai penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Menurut Quraish Shihab, dengan menafsirkan rangkaian kata “*amilina alaiha*” amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.⁴⁵ Adapun syarat-syarat menjadi amil zakat adalah:⁴⁶

- a) Orang Islam (muslim)
- b) Orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya (*mukallaf*)
- c) Orang jujur
- d) Orang yang memahami hukum-hukum zakat
- e) Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas
- f) Laki-laki
- g) Bukan orang yang berstatus hamba sahaya

2) Lembaga Pengelola Zakat

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

⁴⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, cet. I, h. 76

⁴⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat kontemporer*, Bandung: PT Rosdakarya 2011, cet. 5, h. 174

Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional yang pengelolaan di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaanya di urus oleh masyarakat.

3) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam tingkatanya Badan Amil Zakat Nasional memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a) Badan Amil Zakat Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama;
- b) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
- c) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
- d) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah LAZ berskala nasional, dan LAZ berskala kabupaten/kota yang telah mendapat izin resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Untuk memudahkan

⁴⁷Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Diakses pada 27 April 2020 jam 18.41.

pelayanan zakat kepada masyarakat, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat yang mana hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota. Pembentukan UPZ ini diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

4) Lembaga Amil Zakat

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomo Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁸ Ada beberapa alasan mengapa zakat perlu ditunaikan melalui lembaga, yaitu antara lain:

- a) Kalau setiap *muzakki* membayar zakat melalui lembaga, maka akan dapat dikikis sikap “egoisme” *muzakki*, yang seolah memandang harta zakat adalah miliknya semata.
- b) Dengan adanya penyaluran zakat melalui lembaga, maka tidak akan terjadi proses “perendahan” *mustahik*. Karena *mustahik* tidak secara langsung berhubungan dengan *muzakki*. Jika zakat diserahkan langsung oleh *muzakki* kepada individu *mustahik*, maka tidak dapat dicapai pemerataan, keadilan dan ketepatan sasaran. Sudah menjadi fitrah manusia, apabila mengamanahkan dana besar maka

⁴⁸Undang-undang No 23 tahun 2011. Pasal 1. Diakses pada 10 April 2020.
Pukul 08.45

seharusnya melalui “lembaga”, bukan kepada perorangan. Karena jika kepada perorangan yang muncul kemudian adalah rasa ketidakadilan masyarakat manakala dana besar diberikan kepada satu atau dua orang.

- c) Kalau tidak dikelola (melalui lembaga), maka potensi zakat yang besar tidak dapat dimobilisasi dan didayagunakan untuk keperluan strategis umat.⁴⁹

Kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang sama, yakni mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam penyalurannya, Badan Amil Zakat wajib menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum islam.⁵⁰ Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah badan amil zakat yang dikelola oleh Negara dan lembagaamil zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu Negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat Independent, lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan rasa pertanggungjawaban kepada masyarakat yang memberikan donatur.syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

⁴⁹Hidayat Nur Wahid, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006, h. 60

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Kompilasi zakat*, Semarang: Balai Penelitian danPengembangan Agama Semarang, 2010, h. 21

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahwa pemerintah mengukuhkan, membina dan melindungi lembaga amal zakat dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum
- b) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- c) Memiliki pengawas syariat
- d) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- e) Bersifat nirlaba
- f) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala⁵¹

5) Tugas Lembaga Pengelola Zakat

Secara umum, lembaga amal zakat memiliki fungsi mensosialisasikan zakat, mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, dan mengelola harta zakat. Melihat fungsi-fungsi tersebut, diketahui bahwa personil amal zakat memiliki tugas pokok antara lain:

- a) Bidang sosialisasi memiliki tugas pokok menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat.
- b) Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan pendataan *muzakki* dan mengumpulkan harta zakat dari *muzakki*.
- c) Bidang pendistribusian memiliki tugas

⁵¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pasal

pokok melakukan pendataan *mustahik* konsumtif dan melakukan pendistribusian zakat terhadap mereka.

- d) Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan *mustahik* produktif, mendistribusikan zakat kepada mereka, mendampingi, memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka.
- e) Bidang pengelolaan harta zakat memiliki tugas pokok pencatatan, pembukuan dan menginventarisir harta zakat.⁵²

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS memiliki fungsi:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁵³

k. Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola

⁵² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta 2011, h. 129

⁵³ Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Pasal 6 dan 7 tentang pengelolaan zakat. Diakses pada 22 April 2016

yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dari pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁵⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵⁵ Sedangkan lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat.⁵⁶ Dalam masalah pengumpulan zakat, Nabi telah mengarahkan para pengumpul dan pembayar zakat agar bertanggung jawab, memegang amanat dan bersikap lemah lembut.⁵⁷ Dalam mengumpulkan apa yang semestinya, Abu Ubayd menegaskan bahwa hal itu harus dilakukan dalam bentuk kekayaan yang lebih para pembayar zakat. Karena itu, ia menyatakan bahwa jika seorang pembayar zakat menginginkan, ia dapat membayar zakat komoditas dalam bentuk komoditas lain atau dengan tunai yang sebanding.⁵⁸

Untuk memenuhi hajat para *mustahik*, Pengelolaan zakat haruslah berazaskan:⁵⁹

⁵⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta 2011, h. 6

⁵⁵ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan zakat. Diakses pada 27 april 2020 Pukul 07.45

⁵⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen ..*, h. 37

⁵⁷ Yasin Ibrahim al-syaikh, *Kitab Zakat*, Penerbit Marja. Bandung:2008, h. 104

⁵⁸ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, Bandung: Penerbit Nuansa 2005, h.106

⁵⁹ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 2 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses pada 7 Mei 2020. Pukul 07.02

- 1) syariat Islam
- 2) amanah
- 3) kemanfaatan
- 4) keadilan
- 5) kepastian hukum
- 6) terintegrasi dan
- 7) akuntabilitas

Adanya Pengelolaan zakat, hal ini bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁶⁰

Secara umum *mustahik* zakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni *mustahik* zakat produktif dan *mustahik*

- 1) Zakat Produktif. *Mustahik* zakat dalam kategori produktif adalah *mustahik* zakat dari delapan *asnaf* yang mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja.
- 2) Sedangkan *mustahik* tidak produktif adalah *mustahik* dari kelompok delapan *asnaf* terutama fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat, dan tidak mempunyaikemampuan untuk bekerja. *Mustahik* dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan.

Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya. Bagi yang tidak mempunyai potensi, namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja, bahkan diberikan modal untuk mengembangkan

⁶⁰Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 3 tentang Pengelolaan Zakat.

skillnya. Pemberdayaan para *mustahik* produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktifitasnya. Pemberdayaan zakat terhadap para *mustahik* produktif hendaknya dilakukan dengan syarat- syarat dan prosedur yang jelas.

Diantara syarat-syarat pemberdayaan/ pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- 1) Usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- 2) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan
- 3) Usaha *mustahik* di wilayahnya masing-masing
Sedangkan, prosedur pendayagunaan zakat produktif yaitu:
 - a) Melakukan studi kelayakan
 - b) Menetapkan jenis usaha produktif
 - c) Penerima (*mustahik*) usaha produktif diberikan bimbingan dan penyuluhan.

Pemanfaatan dana zakat baik kepada *mustahik* konsumtif maupun kepada *mustahik* produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan. Disamping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok *mustahik* zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi *mustahik*, sehingga mengarah kepada *mustahik* produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat.⁶¹ Pemberdayaan kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi ke empat bagian, yaitu:

⁶¹Umrotun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UINMalikiPress,

- 1) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah suatu bentuk peran serta yang baik dari harta zakat.
- 2) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan.
- 3) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para Muallaf.
- 4) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain yang disebutkan di atas. Diantaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah, ibn sabil, orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan yang berpiutang, walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian ini diterima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan

tujuan diberikannya zakat. Jika tidak, mereka harus menggantinya dan jika mereka menggunakannya kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan⁶²

Sebagaimana tersebut diatas bahwa zakat mempunyai fungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan hartanya kepada orang yang lemah. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan skala prioritas, yakni fakir dan miskin. Zakat yang disalurkan kepada kedua kelompok ini dan bersifat konsumtif, yakni : untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, dan dapat pula bersifat produktif.⁶³

Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniya'* dihabiskan. Maksudnya ada sebagian lain yang mestinya lebih besar dikelola dan didistribusikan secara investatif, untuk memberikan modal kepada para *mustahik*.⁶⁴

Dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Hal ini berarti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat.⁶⁵ Untuk meningkatkan penghasilan, tentu harus kita lakukan peningkatan kerja kaitannya dengan skill dan juga pendidikan, yang lebih penting lagi adalah semangat dan tanggung jawab.

⁶² Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1991, h. 84-86

⁶³ Ahmad Rofiq, *Kompilasi zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 22

⁶⁴ *Ibid...*, h. 268

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Kompilasi...*, h. 22

Dengan demikian, untuk mengurangi kemiskinan, tidak akan selesai dengan cara mengumpulkan zakat kemudian hasilnya dibagi-bagikan secara konsumtif kepada orang-orang miskin.⁶⁶ Menurut Yusuf Qardhawi cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin, baik dengan cara menyemangatnya maupun menyediakan lapangan kerja, karena bekerja merupakan perintah Allah yang sangat jelas bahwa setiap manusia harus bekerja. Berdasarkan hal tersebut, beberapa lembaga pengelola zakat program pendayagunaan zakatnya dilakukan dalam bentuk bantuan ekonomi.

Sebagian besar bantuan ekonomi diberikan berupa modal kerja langsung kepada *mustahik* untuk bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, maupun melalui kelompok-kelompok usaha di bidang pertanian dan peternakan. Problem pengayagunaan bidang ekonomi adalah resiko kegagalan yang tinggi. Kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri, misalnya kelemahan aspek produksi, pemasaran: faktor eksternal seperti cuaca, hilangnya tempat usaha dan yang paling banyak adalah faktor internal *mustahik*.

Rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan data, dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan) merupakan sebagian dari penyebab kegagalan program pendayagunaan ekonomi. Solusi untuk problem tersebut adalah adanya pendampingan kepada *mustahik* yang tidak hanya membantu dalam aspek teknis usaha, namun yang lebih penting adalah membantu mengubah mental *mustahik*.⁶⁷ Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, baik yang bersifat

⁶⁶ Qodry azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004, h. 141

⁶⁷ Hidayat Nur Wahid, *Zakat dan Peran Negara*, jakarta: ForumZakat, 2006, h. 128

langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer of payment* dari pemerintah, misalnya melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro. Secara potensi, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk yang relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula.

1. Distribusi Zakat

Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat. Yakni mengandung makna pemberian harta zakat kepada para *mustahik* zakat secara konsumtif.⁶⁸ Islam menetapkan pembayaran zakat agar sebagian pendapatan kaum kaya dibagikan kepada kaum miskin yang karena ketidakmampuan individual atau kehidupan yang layak dengan usahanya sendiri. Sehingga dalam bahasa Al -Qur'an diungkapkan "kekayaan tidak hanya berputar pada kaum kayadiantara kamu."⁶⁹

Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Zakat sebagai ibadah *maaliyah* mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah.⁷⁰ Pada hakikatnya, zakat merupakan bagian penting dari suatu sistem distribusi kekayaan yang diberikan Allah secara adil dan terperinci untuk manfaat kemanusiaan. Islam tidak menyetujui penimbunan dan penumpukan modal tak terbatas dan menolak pembagian yang sama rata

⁶⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta 2011, h. 71

⁶⁹Yasin Ibrahim al-syaikh, *Kitab Zakat*,. Bandung: Penerbit Marja 2008, h. 48

⁷⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 1.

dalam distribusi kekayaan karena kedua hal tersebut merupakan ketidakadilan. Pemberian zakat kepada para *mustahik*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahik*. Untuk mengetahui kondisi *mustahik*, amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahik*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahik* produktif atau *mustahik* konsumtif.⁷¹

Pada pasal 2 UU No 23 Tahun tentang Pengelolaan Zakat ditegaskan bahwa:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penggunaan dana zakat ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustahik* yang produktif. *Mustahik* dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran. Untuk kemudian modal kerja tadi, oleh Lembaga Zakat dikumpulkan dan pada waktunya diberikan lagi pada *mustahik* lain untuk mengembangkannya.⁷²

⁷¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta 2011, h. 72

⁷² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012, h. 113

Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:⁷³

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

m. Zakat Produktif

Menurut Asnaini, kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi akan pada kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya yaitu dimana zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemebrian zakat yang dapat membuat para penerimaannya menghasilkan sesuatu secara terus –menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan,

⁷³ Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: PrenadaMedia Group 2006. Hal 153

dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan atau terus – menerus.⁷⁴

2. Pengertian Peranan

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Sebagaimana halnya dengan kedudukan. Peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang kelompok. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran-peran individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila misalnya, bila berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah luar.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu

⁷⁴ Asnaini. *Zakat produktif dalam perspektif hukum islam* yogyakarta : pustaka pelajar 2008

pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.⁷⁵

⁷⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Bandung : Raja Grafindo, 2010), h.112-113.

3. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Ekonomi

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi.
- b. pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran.
- c. kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan
- d. pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.⁷⁶

Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).⁷⁷ Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, berasal kata "*empower*" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.

Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan⁷⁸

⁷⁶ Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta. 1996.

⁷⁷ Effendi m. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Sagung Seto, Jakarta: 2002, h. 4

⁷⁸ *Ibid* ..., h. 3.

Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.⁷⁹

Pemberdayaan dalam arti lain adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau miskin.⁸⁰ Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan.

Pertama, pilihan-pilihan personel dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. *Kedua*, pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. *Ketiga*, Ide atau gagasan: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga sosial, pendidikan, kesehatan. *Keempat*; sumber-sumber kemampuan memobilisasi, sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan. *Kelima*; Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. *Keenam*, Reproduksi:

⁷⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2002, h. 9

⁸⁰ *Ibid* ..., h. 56

kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.⁸¹

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup yang berkuasa dan berdaya. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuannya, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang bergaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.⁸²

a. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5P, yaitu:

- 1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
- 2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap dan kepercayaan

⁸¹ Edi Suharto, *Membangun....*, h. 59

⁸² Edi Suharto, *Membangun....*, h. 58

diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- 3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
- 4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.⁸³

4. Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Dalam Islam Kesejahteraan.

Menurut Purwana (2014) Al-quran menjelaskan bahwa konsep yang sama mengenai kesejahteraan, yaitu adalah kehidupan yang baik dengan terpenuhinya kebutuhan materi maupun non materi pada surat An-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁸³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2002. hal 67

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

[839] Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Dari keterangan tersebut diatas maka diketahui bahwa kesejahteraan menyangkut terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan dan spiritual.

5. Maqashid Syari'ah

a. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Maqashid Asy-syaria'ah adalah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Maka dengan demikian, maqashid asy-syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penetapan hukum. Urgensi teori maqashid asy-syariah didasarkan pada pertimbangan pertimbangan sebagai berikut : pertama, hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan social. Kedua, dilihat dari aspek historis sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid asy-syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dan ijtihadnya , karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama

manusia dapat dikembalikan.⁸⁴ Maqashid Al-Syariah merupakan landasan penting dalam menegakkan tiang agama yakni kemaslahatan yang adapun hasil dari kemaslahatan tersebut menjadi 5 kemaslahatan untuk dilindungi. Penetapan hukum dalam Maqashid Al-Syariah ini juga ditentukan dengan beberapa alasan yang berguna untuk menyelesaikan kemaslahatan yang ada. Maqashid Al-Syariah ini memiliki peranan penting dalam proses terjadinya hukum. Penetapan dalam menentukan dasar hukum Maqashid Al-Syariah bisa dinyatakan secara spesifik sebagai tujuan dari syari'at melalui tiga cara penetapan, menurut Ash-Syatibi tiga cara penetapan itu adalah :

- 1) Dengan mengetahui dalil perintah atau larangan secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
- 2) Dengan memandang alasan dari perintah dan larangan, seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.
- 3) Dalam penerapan hukum syari'at, syar'I memiliki tujuan pokok (Maqashid Ashliyyah) dan tujuan pelengkap (Maqashid Tabi'ah). Tertera secara eksplisit, tersirat secara implisit, ataupun didapatkan dari hasil penelusuran (istiqra') terhadap nash. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap Maqashid yang tidak tertera dalam nash namun tidak bertentangan dengan ketentuan diatas, maka termasuk dalam Maqashid Al-Syariah.

Adapun pokok dalam kemaslahatan yang menjadi dasar dalam maqashid al-syariah sebagai tujuan syariah, seperti yang telah dihitung juga oleh ulama dengan nama al-kulliyat al khams (lima hal

⁸⁴Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Asy-Syariah Dalam Hukum Islam, (Fakultas Agama Islam Sultan Agung, 2009), H. 118-119.

inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan syariat yang harus dijaga, yakni :

- 1) Kemaslahatan Dharurriyah (Inti/Pokok), yaitu kemaslahatan Maqashid Al-Syariah yang berada dalam urutan paling atas.
- 2) Kemaslahatan Ghairu Dharurriyah (Bukan Kemaslahatan Pokok), namu kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

b. Unsur- Unsur Maqashid Syariah

Adapun syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (maqashid ad-dharuriyat) yakni :

1) Memelihara Agama

Agama merupakan persatuan aqidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disediakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna.

2) Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukum Qiyas (pembalasan yang seimbang), Diyat (denda) dan Kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu karena jika yang dibunuh mati atau jika yang dibunuh cedera, maka pelakunya akan cedera yang seimbang dengan perbuatannya.

3) Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan

akal.

4) Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara cara perkawinan itu dilakukan dan syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah.

5) Memelihara Harta Benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda adalah milik Allah SWT, namun Islam juga mengaku hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tamak' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.⁸⁵



⁸⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang : UIN Malang Press, 2007), h. 106-163.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Al-Zuhaly, Wahbbah. *Zakat Berbagai Mazhab*. (Bandung : PT Rosdakarya 2005).
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat*. (Penerbit Marja. Bandung: 2008).
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 1. 2008.
- Arifin, Gus. *Zakat, Infak, Sedekah*. (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2011).
- Arikunto, Suharismi. *Metodelogi Penelitian*. (Yogyakarta : Bina Aksara, 2006),.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008).
- Azizi, Qodry. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Azmi, Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2005).
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran Terjemahan*. (Jakarta Pusat :Pena Pundi Aksara, 2002).
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Persektif Islam*. (Malang : UIN Malang Press, 2007)
- Dompet Dhuafa, (Membentang Kebaikan, Jakarta 2016).
- Ghozali, Syukri, dkk. *Pedoman Zakat 9 Seri*. (Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 2000).
- Guntur, Effendi M. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Sagung Seto, Jakarta: 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research. Jilid I*. (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1983).

- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, cet. I.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Indonesia Zakat And Development Report 2010. (diolah dari laporan tahunan BAZNAS 2008)
- Ismail, Asep Usman, Dkk, *Pengamalan Al-Quran tantang Pemberdayaan Dhuafa*. (Jakarta : Dakwah Press, 2008).
- Ismail, Shafwan, Sri Sudiarti & M. Ridwan, Peranan Dompot Dhuafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kota Medan. KITABAH: Volume 2. No. 2 Juli – Desember 2018.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung : Mandar Maju, 2012).
- Khasanah, Umrotun. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UINMaliki Press, 2010.
- Kountur, Rony. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1991.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenada Media Group 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. (Jakarta : Lentera, 2011).
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet.5 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin, Dkk,. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. (Kencana : 2007).
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Prijono,O.S., Pranarka,A.M.W. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta. 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. cet. Ke-12, Jakarta: Lintera Antarnusa, 2011.
- , *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press 1995.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir FI Zhilalil Qur'an*. (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Ridwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat*. Bandung: tafakur (kelompok Humaniora)-Anggota IKAPI Berkhidmat untuk Umat, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Bandung : Raja Grafindo, 2010).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kkualitatif Dan R & D*. (Bandung Alfabeta, 2016),.
- , *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung : CV,Alfabeta, 2012).
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam. (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*.
- Wahid, Hidayat Nur, *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Widodo, Hartanto dan Teten Rustiawan “*Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organissi Pengelola Zakat*” (Asy Syanil Press : Bandung : Tahun 2003)

Karya Ilmiah:

- Beik, Irfan Syauqi. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009
- Fauyi'ah, Suci Nur. *Dampak Pelaksanaan Program Community Development Dompet Dhuafa Cabang Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Karang Kulon Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018
- Hotlina. *Peranan Program Kampung Ternak Lembaga Amil*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020
- Karmelita, Dameria & Nursanita Nasution. *Studi Fenomenologi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa)*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 2020.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Asy-Syariah Dalam Hukum Islam*. (Fakultas Agama Islam Sultan Agung, 2009)
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012.

Internet:

- Badan Pusat Statistik. tahun 2016.
<https://www.bps.go.id>
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Undang-undang No 23 tahun 2011.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Pasal 6 dan 7 tentang pengelolaan zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada Pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan zakat.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 2 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 3 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pasal 57.

Zakat And Development Report 2010, (*diolah dari laporan tahunan BAZNAS 2008*)

Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat